

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ilmu Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Ilmu ekonomi regional dapat menyarankan komoditi/kegiatan apa yang perlu dijadikan unggulan dan sub wilayah mana komoditi itu dapat dikembangkan.

Manfaat ilmu ekonomi regional dapat dibagi dua yaitu manfaat makro dan manfaat mikro. Manfaat makro berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan keseluruhan wilayah. Manfaat mikro yaitu bagaimana ilmu ekonomi regional dapat membantu perencanaan wilayah menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan proyek. Dengan adanya ilmu ekonomi regional menandakan bahwa pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan ekonomi daerah sebagai salah satu cara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional diman ilmu ekonomi regional.

1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Ukuran kemajuan perekonomian pada suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang berkembang di negara tersebut, pertumbuhan ekonomi akan menjadi pusat perhatian karena bisa menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan perekonomian suatu kelompok secara kuantitas yang dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan pertahunnya dan

berbanding lurus dengan meningkatnya daya beli atau dengan kata lain meningkatnya pendapatan seseorang atau kelompok dan jika diteliti maka akan berbanding lurus dengan pengeluaran yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang disebabkan atau dibentuk dalam berbagai macam sektor ekonomi yang secara langsung dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi sebagai indikator penting bagi suatu daerah dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008). Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dengan begitu, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan merupakan suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi (Gayatri, 2010).

1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi selain secara keseluruhan (nasional) ada juga pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan wilayah ini merupakan pertumbuhan pendapatan wilayah masyarakat yang terjadi dimasyarakat diwilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan suatu daerah, tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada daerah tersebut.

1.1.4 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan tingkat pendapatan suatu daerah dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan aspek-aspek dalam struktur perekonomian serta pemerataan pendapatan penduduk di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemeratakan

pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Menurut Todaro dan Smith (2006:103), bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Persepektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita, tetapi juga indikator lainnya seperti ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, dan jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran.

1.1.5 Pembangunan Daerah

Setiap pembangunan daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah, (Syafrizal, 2008:8).

1.1.6 Pendapatan Regional

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu Tahun (Sukirno, 1985). Sedangkan menurut Tarigan (2004), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat Pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat Pada wilayah tersebut. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan PDRB

2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)

Produk Domestik Regional Neto dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut (*aus*) atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan yang lain-lainnya) karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan. Tetapi bila PDRN di atas dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka akan diperoleh PDRN atas dasar biaya faktor.

1.1.7 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No 33 Tahun 2004 PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004:96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan

Sumber-Sumber pendapatan asli daerah diantaranya:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Provinsi. Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dibayar untuk masa 12 bulan atau satu tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor berikut rinciannya:

- a) Tarif paling rendah 1% dan paling tinggi adalah 2% dari dasar pengenaan pajak (DPP). DPP dihitung dengan mengalikan nilai jual kendaraan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kendaraan tersebut. tarif yang berlaku berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebesar:
 - b) Paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1% untuk angkutan umum, ambulance pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah, TNI/Polri, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - c) Paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2% untuk alat-alat berat dan besar.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan/pemasukan kedalam badan usaha. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama 20%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1%

Khususnya untuk kendaraan bermotor, alat alat berat dan alat alat besar ditetapkan paling tinggi masing masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama 0,75%.
 2. Penyerahan kedua dan seterusnya 0,075%
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Tarif PBB-KB paling tinggi sebesar 10% khusus untuk bbm kendaraan umum dapat ditetapkan 50% lebih rendah dan tarif tinggi.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif pajak air permukaan paling tinggi sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai perolehan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari DPP. DPP adalah sebesar cukai yang diterapkan pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak yang terdapat di Kabupaten/Kota terdiri atas

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh

pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari DPP (jumlah pembayaran). Khusus untuk hiburan berupa kontes kecantikan, diskotik, karaoke, panti pijat, pagelaran busana, dan SPA tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan hiburan tradisional paling tinggi sebesar 10%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang atau badan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kota. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari DPP (nilai jual tenaga listrik). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas ditetapkan paling tinggi 3% sedangkan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi 1,5%.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbestos, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, granit dan lain

sebagainya. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari DPP (nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan).

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari DPP (jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir)

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari DPP (nilai perolehan air tanah) pajak air tanah yang terutang dipungut dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

j. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatna sarang burung walet. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari DPP (nilai jual sarang burung walet).

k. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual Sarang Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan paling rendah sebesar 10.000.0000

l. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pajak pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif ditetapkan paling rendah sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. besarnya nilai perolehan objek pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.0000.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU NO 28 Tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, melalui uu no 28 Tahun 2009. Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi yang terdiri dari:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta kriteria retribusi jasa usaha adalah

- a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang selayaknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam barang prasarana

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain, yaitu:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Tabel 2. 1
Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
(1)	(2)	(3)
Retribusi pelayanan kesehatan	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Retribusi izin mendirikan bangunan
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Retribusi pasar grosir/pertokoan	Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil	Retribusi tempat pelelangan	Retribusi izin gangguan
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	Retribusi terminal	Retribusi izin trayek
Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	
Retribusi pelayanan pasar	Retribusi tempat khusus parkir	
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Retribusi tempat penginapan/	

(1)	(2)	(3)
	Persinggahan/villa	
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Retribusi penyedotan kakus	
Retribusi pemeriksaan alat pemdamam kebakaran	Retribusi rumah potong hewan	
Retribusi penggantian biaya cetak peta	Retribusi pelayanan pelabuhan kapal	
Retribusi pengujian kapal perikanan	Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	
	Retribusi penyebrangan diatas air	
	Retribus pengolahan limbah cair	

Sumber: Buku Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan milik swasta. BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi kinerja dari BUMD dari sisi internal harus mampu menjadi pemicu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah antara lain: laba atas penyertaan modal pada BUMD, laba atas penyertaan modal pada BUMD dan laba atas penyertaan modal pada perusahaan patungan/swasta.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dari hasil pengelolaan dana bergulir atas pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.

1.1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (Provinsi/Kabupaten/Kota). Produk domestik regional bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS, 2015:1).

Menurut BPS, ada dua cara dalam penyajian produk domestik regional bruto

1. Metode Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.

Pendapatan Regional Kabupaten/Kota atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung akan dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Di samping itu manfaat pemakaian data daerah dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah ini.

1. Metode Langsung

Metode langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokasi pendapatan regional Provinsi menjadi pendapatan regional Kabupaten /Kota dengan memakai berbagai pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor. Pendekatan ini biasa juga disebut dengan pendekatan nilai tambah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk

sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di dalam wilayah Kabupaten/Kota. Jadi produk domestik regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional tersebut.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto dan perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor).

2. Metode Tidak Langsung (Metode Alokasi)

Metode alokasi pendapatan regional Provinsi adalah menghitung pendapatan regional Kabupaten dengan cara mengalokir angka pendapatan regional Provinsi untuk tiap-tiap Kabupaten /Kota dengan menggunakan alokator tertentu.

Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas:

- a) Nilai produksi bruto atau neto,
- b) Jumlah produksi fisik,
- c) Tenaga kerja,
- d) Penduduk, dan
- e) Alokator lainnya yang dianggap cocok untuk daerah tersebut.

2. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produktivitas secara nyata, faktor pengaruh atas perubahan harga perlu dihilangkan

dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan. Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut.

Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk perencanaan dan proyeksi pada masa yang akan datang atau ramalan dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari penghitungan atas dasar harga konstan. Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar.

Perhitungan produk domestik regional bruto saat ini menggunakan seri tahun 2010, untuk klasifikasi lapangan usaha berdasarkan seri 2010 terbagi menjadi 17 sektor pembentukan PDRB yaitu sebagai berikut:

1. Sektor pertanian.
2. Sektor pertambangan dan penggalian.
3. Sektor industri pengolahan.
4. Sektor pengadaan listrik dan gas.
5. Sektor pengadaan air.
6. Sektor konstruksi.
7. Sektor perdagangan besar dan eceran.
8. Sektor transportasi dan pergudangan.

9. Sektor penyediaan akomodasi.
10. Sektor informasi dan komunikasi.
11. Sektor jasa keuangan.
12. Sektor real estate.
13. Sektor jasa perusahaan.
14. Sektor administarsi pemerintah.
15. Sektor jasa pendidikan.
16. Sektor jasa kesehatan.
17. Sektor jasa lainnya

1.1.9 Sektor Basis dan Non Basis

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan serta menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini maka digunakan metode-metode analisis data sebagai berikut:

1. Teori basis dan Non Basis

Sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang memiliki keunggulan lebih serta dapat menciptakan kegiatan basis berupa ekspor ke luar daerahnya. Sebaliknya dengan sektor non basis, sektor tersebut kurang mampu jika dilakukan orientasi ekspor sebab hanya mencukupi kebutuhan di daerahnya saja. Setiap daerah harus mengetahui sektor mana saja yang dapat menjadi penunjang perekonomian di daerahnya. Pada umumnya

analisis basis ekonomi menggunakan variabel lapangan kerja atau pendapatan. Variabel pendapatan lebih tepat sasaran sebab peningkatan pendapatan di sektor basis akan mendorong kenaikan pendapatan di sektor non basis dalam bentuk korelasi yang lebih ketat dibanding dengan menggunakan variabel lapangan kerja.

Dalam memilah antara kegiatan basis dan kegiatan non basis perlu digunakan metode yang tepat agar suatu daerah dapat menganalisis potensi daerahnya melalui sektor basis. Oleh karena itu terdapat metode untuk memilah antara kegiatan basis dan kegiatan non basis antara lain:

1. Metode Langsung

Metode langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut.

2. Metode Tidak Langsung

Mengingat rumitnya melakukan survei langsung ditinjau dari sudut waktu dan biaya, banyak juga dipakai metode tidak langsung dalam mengukur kegiatan basis dan non basis tersebut. Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan lokal dianggap non basis. Dalam metode asumsi, kegiatan lain yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan non basis.

3. Metode Campuran

Suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan non basis. Penggunaan metode asumsi murni akan memberikan kesalahan yang besar. Akan tetapi, penggunaan metode langsung yang murni juga cukup berat, sehingga yang sering dilakukan orang adalah gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung yang disebut metode campuran.

1.1.10 Metode *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional (Robinson, 2014).

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah. Disamping itu juga digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu wilayah.

Analisis dengan model *Location Quotient* menurut Miller et al. (1991) dan Hood (1998) digunakan untuk melihat lapangan usaha basis atau non basis pada suatu wilayah perencanaan dan dapat mengidentifikasi lapangan usaha unggulan atau keunggulan komparatif suatu wilayah.

Metode *Location Quotient* dengan membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Variabel yang umum digunakannya adalah nilai tambah dan jumlah lapangan kerja. Rumus *Location Quotient* sebagai berikut (Achmad zaini, 2019:150)

$$LQ = \frac{(S_{ij}/S_i)}{(\sum S_j / \sum S)}$$

Dimana:

LQ : Indeks *Location Quotient*

S_{ij} : Total sektor i Pada daerah j

S_i : Total produksi sektor i

S_j : Total Produksi Pada daerah j

S : Total produksi seluruh daerah

1.1.11 Sektor Unggulan

Sektor unggulan menurut tumenggung (1996) adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional/ pada lingkup internasional suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain baik di pasar nasional maupun domestik.

Sambodo (dalam Firman, 2007), ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah sebagai berikut:

- a. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- b. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatif besar.

- c. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan depan ataupun kebelakang.
- d. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

1.1.12 Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif jadi apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah diketahui lebih dahulu pembangunan sektor itu dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan lambat keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah.

Menurut Tarigan terdapat beberapa faktor yang bisa membuat suatu daerah memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dapat berupa kondisi alam yaitu sesuatu yang sudah given tetapi dapat juga karena usaha manusia. Sesuatu wilayah memiliki keunggulan komparatif karena salah satu faktor atau gabungan dari beberapa faktor yang akan diuraikan berikut ini. Faktor-faktor yang dapat membantu suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif dapat dikelompokan sebagai berikut.

1. Pemberian alam yaitu karena kondisi alam akhirnya wilayah itu memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu.
2. Masyarakatnya menguasai teknologi mutakhir (menemukan hal-hal baru untuk jenis produk tertentu).
3. Masyarakatnya menguasai keterampilan khusus.

4. Wilayah itu dekat dengan pasar.
5. Wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi.
6. Daerah konsentrasi atau sentral dari suatu kegiatan sejenis.
7. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan.
8. Upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta didukung oleh keterampilan yang memadai dan mentalitas yang mendukung.
9. Mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan: jujur, terbuka, mau bekerja keras, dan disiplin sehingga lingkungan kehidupan aman, tertib teratur.
10. Kebijakan pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam suatu proses penelitian dibutuhkan penelitian terdahulu untuk sebagai referensi. Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh sejumlah peneliti yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai pengaruh sektor unggulan perekonomian terhadap PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Penulis dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014. (Bramantyo Adi Nugroho. 2017). Jurnal "Gerbang Etam" Balitbangda Kabupaten Kukar Vol. 11 No. 1 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB (ADHK) Kabupaten Kutai Kartanegara • PDRB (ADHK) Provinsi Kalimantan Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dynamic Location Quotient</i> • <i>Klassen Typology</i> • <i>Shift-Share.</i> 	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa antara Tahun 2010-2014 sektor unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
2.	Peranan Sektor Basis Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Sarolangun Periode 2001-2012. (Andi Ayu Puji Lestari. 2017). Jurnal Manajemen terapan dan keuangan, 2017, 6.1: 23-32	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Sektor basis, • PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB (ADHB) • Pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Didapat 3 (tiga) sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor perdagangan dengan nilai <i>Location Quotient</i> > 1. • Dengan menggunakan model regresi sederhana diperoleh bahwa sektor basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Sorolangun.
3.	Analisis Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Analisis <i>Location Quotient</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shift Share</i> • MRP • Analisis 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor ekonomi basis di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Dalam Provinsi Kalimantan Timur. (Aji Desilia Anggareni. 2018). Jemi Vol 18/No.1/Juni/2018</p>		<p>Overlay, • Tipologi Klassen</p>	<p>Sektor yang mengalami laju pertumbuhan pesat dalam peralihan ekonomi adalah konstruksi, transportasi dan penyimpanan, akomodasi dan kegiatan pelayanan makanan, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, kegiatan usaha, pendidikan, kesehatan manusia dan kegiatan pekerjaan sosial, dan kegiatan pelayanan lainnya.</p> <p>• Sektor yang memiliki kekuatan daya saing adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, listrik dan gas, air bersih, saluran air limbah, pengelolaan dan remediasi limbah, administrasi publik, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pendidikan, kesehatan manusia dan kegiatan pekerjaan sosial.</p>
4.	<p>Analisis Sektor Unggulan Pembangunan Ekonomi Daerah Dan Strategi Pengembangan (Studi Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016). (Andriani Novitasari. 2019) Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia. Vol. 18 No. 1</p>	<p>• PDRB • <i>Location Quotient</i>.</p>	<p>• Model Rasio pertumbuhan • Analisis Overlay, • Analisis SWOT, • Analisis Klassen Typologi</p>	<p>• Hasil analisis Location Quotient (LQ) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ adalah sektor Pertanian dan sektor Pertambangan</p> <p>• Hasil penelitian Klassen Typologi sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan merupakan Sektor maju cepat</p> <p>• Hasil analisis SWOT, adalah meningkatkan perekonomian daerah melalui potensi sektor basis, meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas dan prasarana publik dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah</p> <p>• Hasil analisis Overlay yaitu</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(2018)			sektor Pertanian, Kehutanan, dan sektor pertambangan.
5.	Pengaruh Sektor Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. (Riadi Armas & Dian Alfira Kasmita. 2014). Pekbis Jurnal, Vol.6, No.1, Maret 2014: 55-65	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PAD • Uji t • Uji koefisien determinasi (R²) 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan Regresi Linear Berganda yang menggunakan program SPSS versi 16.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian bahwa sektor ekonomi tanpa Migas terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Provinsi Riau. • Hasil penelitian bahwa sektor ekonomi dengan Migas terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Provinsi Riau.
6.	Pengaruh Sektor Ekonomi Terhadap PAD Di Kabupaten Dairi. (Monika Karolina Sianturi, Ahmad Albar Tanjung. 2020). Journal Of Business And Economics Research (JBE) Vol 1, No 3, October 2020, Hal. 266-275 ISSN 2716-4128 (Media Online)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB (ADHK) • Pendapatan Asli Daerah, • <i>Location Quotient</i> (LQ) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shift Share</i> 	Kabupaten Dairi memiliki satu sektor unggulan dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada yaitu sektor konstruksi. Sektor konstruksi dapat dikembangkan dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD
7.	Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB harga konstan. • <i>Location</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shift Share</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis <i>Location Quotient</i>, sektor basis di Kabupaten Pati antara lain sektor pertanian, sektor

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. (Bambang Prishardoyo. 2008). Jejak, Volume 1, Nomor 1, September, 2008</p>	<p><i>Quotient</i></p>		<p>listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis <i>Shift Share</i>, sektor yang memiliki nilai positif yaitu sektor pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.
8.	<p>Analisis <i>Location Quotient</i> Subsektor Pertanian Unggulan Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Astik Drianti Dan Ardiyanto. 2016). Volume 16 (No. 2) Oktober 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Location Quotient</i> (LQ) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 - 2013 pada masing-masing kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Subsektor Pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman bahan pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat 32 subsektor pertanian basis atau unggulan yang tersebar di 18 kecamatan. • Subsektor pertanian yang menjadi basis terbanyak pada tiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sektor kehutanan dan perikanan.
9.	<p>Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman Dengan Metode <i>Shift Share</i> Dan <i>Location Quotient</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Location Quotient</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan <i>Shift Share</i> (SS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor unggulan Kabupaten Sleman yaitu sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estate, dan sektor jasa perusahaan. • Sektor terbelakang Kabupaten Sleman yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Mahmud Basuki, Febri Nugroho Mujiraharjo. 2017). Journal Homepage.			penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan.
10.	Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus Bps Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010). (Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, Yuciana Wilandari. 2013). Jurnal Gaussian, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 219-228	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Atas Dasar Harga Konstan, • Location Quotient (Lq) 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB atas dasar harga berlaku • Revaluasi • Deflasi • MRP • Overlay • <i>Shift Share</i> • Tipologi Klassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil metode analisis Tipologi Klassen, LQ, MRP dan Overlay memberikan hasil yang sama yaitu, sektor yang merupakan sektor unggulan atau dominan di Kabupaten Kendal adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan. • Sektor yang termasuk dalam sektor potensial adalah sektor industri industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air minum. • Sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa termasuk dalam sektor yang terbelakang. Sektor pengangkutan dan komunikasi termasuk dalam sektor berkembang. • Dari beberapa metode yang digunakan dapat memberikan hasil yang sama
11.	Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Tengah. (Daryono Soebagiyo Dan Arifin Sri). Hascaryo.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sektor ekonomi unggulan</i> • Location Quotient 	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen yang berperan terhadap pertumbuhan adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan. • Keunggulan sektor primer yaitu Kabupaten Wonogiri, Sragen, Boyolali, Semarang, Kendal, Kebumen, dan Purworejo. Keunggulan sektor sekunder yaitu Kota Surakarta, Semarang, Salatiga, Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2015). Univesity Research Colloquium. Ssn 2407- 9189.			Karanganyar, Klaten, Semarang dan Kebumen. Keunggulan sektor tersier ada yaitu kota Surakarta, Semarang, Salatiga, Pekalongan, Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen dan Purworejo.
12.	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomia n Kota Singkawang Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) . (Uray Dian Novita. 2017). Vol 1, No 1 (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB (ADHK) • <i>Location Quotient</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shift Share</i> • <i>Overlay Tipology Klassen,</i> 	<p>perusahaan dan sektor jasa merupakan sektor basis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang berkompetitif. • Hasil overlay memenuhi ketiga kriteria analisis diatas yaitu semua menunjukkan angka yang positif.
13.	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomia n Di Kabupaten Kubu Raya. (Hajeri, Erlinda Yurisinthae Dan Eva Dolorosa. 2015). Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausaha an 2015, Vol.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Location Quotient</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Typology Klassen</i> • <i>Leading sector</i> • <i>Dynamic Location Quotient</i> • <i>Shift Share</i> • <i>Overlay</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Tipology Klassen menunjukkan bahwa sektor yang tergolong sektor maju dan cepat tumbuh (Kuaran 1) adalah sektor industri Pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor pengangkutan dan Komunikasi. • Analisis Location Quetiont menunjukkan bahwa Sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis • Hasil analisis DLQ yaitu sektor pertanian, sektor

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4, No. 2, 253-269			<p>pertambangan, & penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan gas, & air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan, & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis gabungan LQ dan DLQ yaitu sektor pertanian, pertambangan & penggalian, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. • Hasil analisis Shift Share klasik menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten uapetn Kubu Raya dari sektor Industri Pengolahan (sekunder) ke sektor Pengangkutan dan Komunikasi (tersier) kemudian menuju sektor Pertanian • Hasil analisis Shift Share adalah sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas, dan air bersih • Hasil analisis overlay menunjukan sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor unggulan yang menunjukkan angka koefisien positif
14.	Analisis Sektor Unggulan Dan Pengaruhnya Terhadap PAD Kabupaten	Location Quotient (LQ) <ul style="list-style-type: none"> • Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • SPSS • Tipologi Klassen 	Sektor unggulan di Kabupaten Mimika yaitu <ul style="list-style-type: none"> • Sektor unggulan Kabupaten Mimika yang terdiri dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mimika. (Ida Adriyani. 2018). Vol 2 No2 (2018) : Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset Dan Inovasi)			sosial
15.	Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. (Bambang Kurniawan. 2016). Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016 Issn 2354 – 905x	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PDRB (ADHK)</i> • <i>Location Quotient</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shift Share</i> • <i>DLQ</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis LQ Sektor pertanian dan jasa-jasa merupakan sektor basis yang merupakan sektor unggulan. • Berdasarkan komponen Shift Share disimpulkan bahwa nilai Proportional Shift (PS) masing-masing yang positif disumbangkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan kounikasi, keuangan real estate dan jasa perusahaan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran • Berdasarkan analisis DLQ yaitu Sektor pengangkutan, pos dan komunikasi, listrik gas dan air bersih, keuangan real estate dan jasa perusahaan merupakan sektor yang sangat potensial serta prospektif untuk dikembangkan kedepan.
16.	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomia n Kabupaten Kutai Kartanegara. (Wahyuni. 2017). Issn 1978- 838x	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Location Quotient</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis tipologi klassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas pertama pembangunan yaitu perkebunan tahunan; dan jasa pertanian dan perburuan. Prioritas kedua pembangunan yaiitu tanaman pangan; tanaman holtikultur semusim; peternakan; kehutanan dan penebangan kayu; dan perikanan. • Prioritas pertama pembangunan yaitu pertambangan dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kartanegara. (Wahyuni. 2017). Issn 1978-838x			<p>penggalian pada sub kategori pertambangan bijih logam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioritas kedua pembangunan yaitu pertambangan minyak dan gas
17.	<p>Analisis Pengaruh Potensi Ekonomi Terhadap PAD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2016. (Fara Euginia). Seminar Nasional Keindonesiaan III Tahun 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis <i>Location Question</i> (LQ) • Uji Parsial 	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Regresi Tunggal, 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata analisis LQ yang memiliki nilai basis adalah sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan (X1) LQ 23,22. Sektor pertambangan dan Penggalian (X2) LQ 14,41, Sektor Industri Pengolahan (X3) LQ 5,21. Sektor bangunan dan kontruksi (X5) LQ 1,65, Sektor Perdagangan, hotel dan restoran (X6) LQ 1,82. • Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (X1), Pertambangan dan Penggalian (X2), Industri Pengolahan (X3), Listrik, Gas dan Air (X4), sektor pengangkutan dan komunikasi (X7), Sektor Jasa-jasa (X9) Perdagangan, Hotel dan Restoran (X6), sektor jasa- jasa (X9) memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD(Y). • Variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu Variabel Bangunan dan kontruksi (X5) dan variabel keuangan, persewaan dan Jasa perusahaan (X8).
18.	<p>Analisis Sektor Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. (Mahrita, Sri Mintarti, Fitriadi. 2016).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis <i>Location Quotien</i> (LQ) 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis <i>Shift Share</i> • Analisis kuadran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kategorikan sektor basis adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi bangunan, sektor perdagangan komunikasi,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen, Volume 12, (2), 2016 ISSN Print: 0216-7786, ISSN.</p>			<p>sektor keuangan dan sektor jasa- jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektor yang memiliki daya saing yang kuat adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan dan sektor jasa – jasa. • Sektor yang laju pertumbuhannya tergolong maju adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa- jasa.
19.	<p>Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur, Bali, Dan Nusa Tenggara Barat: Pendekatan Input-Output Multiregional. (I Dewa Made Darma Setiawan. 2007). Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2006.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi Tabel Input-Output Multiregional 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor unggulan di masing-masing propinsi yaitu: sektor industri makanan, minuman, dan tembakau, dan sektor perdagangan di propinsi Jawa Timur; sektor hotel dan restoran, dan sektor peternakan dan hasilnya, terpilih sebagai sektor unggulan di propinsi Bali; sektor industri makanan, minuman, dan tembakau dan sektor hotel dan restoran terpilih di propinsi Nusa Tenggara Barat. • Pertumbuhan sektor-sektor unggulan ini akan berdampak pada output, nilai tambah bruto, dan penyerapan tenaga kerja intraregional dan interregional.

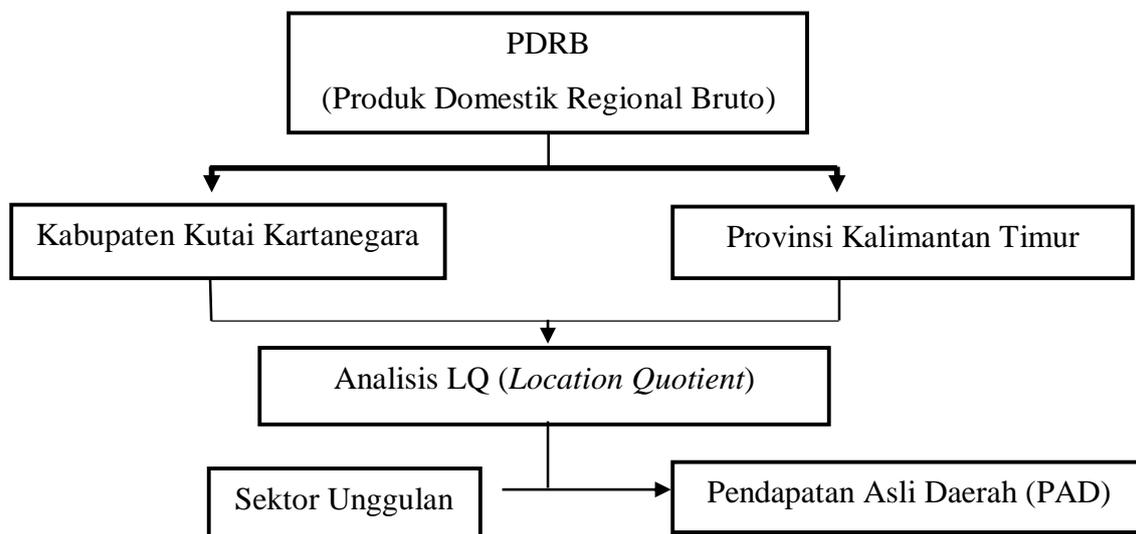
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	<p>Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jayapura. (Maria Ponto, Josep B. Kalangi, Antonius Y. Luntungan. 2015). Vol15, N0 02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis <i>Location Quotient</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis <i>Shift Share</i> • Analisis MRP • Analisis overlay • Analisis Rasio Tenaga Kerja (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shift Share</i> menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi di kota jayapura dari sektor primer ke sektor tersier. • Hasil analisis <i>Location Quotient</i> yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan persewaan, serta sektor jasa-jasa. • Hasil analisis MRP bahwa seluruh sektor perekonomian baik yang ada di provinsi papua maupun kota jayapura memiliki pertumbuhan yang rendah. • Hasil analisis overlay tidak ada sektor unggulan untuk dikembangkan berdasarkan kriteria pertumbuhan (+) dan kriteria kontribusi (+). • Analisis rasio tenaga kerja (rtk) adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa jadi, meskipun sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa bukan merupakan sektor unggulan kota Jayapura, namun sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diperlukan untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian tentang “Pengaruh Sektor Unggulan Perekonomian Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara”. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sektor unggulan ini dilakukan dalam 2 tahap. Pertama analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran *Location Quotient* yaitu dengan membandingkan kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertera dari data PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Timur agar dapat diidentifikasi sektor mana yang menjadi sektor unggulan.

Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan dengan regresi *Ordinary Least Square* (OLS) dilakukan untuk mengetahui pengaruh sektor unggulans terhadap PAD. Regresi OLS dengan data sekunder dilakukan dengan menggunakan variabel yang diperoleh dari sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara serta PAD sebagai variabel terikat. Adapun untuk kerangka pemikiran khusus pada tahap regresi OLS adalah sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Besar kecilnya PAD atau tinggi rendahnya PAD dipengaruhi oleh PDRB, karena semakin maju perekonomian ditunjukkan oleh semakin meningkatnya PDRB dan pendapatan perkapita penduduknya. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap sektor lain atau perekonomian secara keseluruhan sehingga dapat berdampak pada peningkatan PAD. Disebabkan karena pada dasarnya terdapat beberapa pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan PDRB sektor ini. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pula pada pendapatann asli daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hubungan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Ayu Puji Lestari yang berjudul peranan sektor basis terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2001-2012 hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fara Euginia yang berjudul “Analisis Pengaruh Potensi Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2016” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD.

1.3.2 Hubungan Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sektor pertambangan dan penggalian adalah bentuk dari sumbangan atau sokongan dari sektor pertambangan dan pengglialian kepada PAD yang dianggap cukup untuk membiayai pembangunan daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Hubungan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Ayu Puji Lestari yang berjudul peranan sektor basis terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sarolangun

Tahun 2001-2012 hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD.

Penelitian lain oleh Diah Sulastri, Anwar Alaydrus dan Budiman hasil dari pertambangan batu bara dikontribusikan dalam bentuk sumbangan atau sokongan yang diberikan kepada Kutai Kartanegara dimulai Tahun 2000 hingga sekarang yang nantinya dipakai untuk membiayai pembangunan daerah.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah pada penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Karena belum teruji kebenarannya maka diambil suatu hipotesis. Adapun hipotesis yang digunakan yaitu:

1. Diduga secara parsial sektor unggulan berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Diduga secara bersama-sama sektor unggulan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

